

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Dayeuh Kolot

Rini Rinawati, Dedeh Fardiah , Oji Kurniadi*

Abstrak

Pembangunan partisipatif adalah suatu pembangunan yang memungkinkan menumbuhkan kreatifitas dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan di suatu kawasan atau lingkungannya. Partisipasi masyarakat akan mengarahkan kepada tumbuhnya kemampuan-kemampuan masyarakat untuk mandiri. Partisipasi tidak hanya terbatas dalam pengertian “ikut serta” secara fisik, melainkan keterlibatan yang memungkinkan melaksanakan identifikasi masalah sendiri, mengorganisasikan masalah, mencari akar masalah dan menentukan perencanaan program pembangunan.

Perencanaan pembangunan partisipatif dipandang sebagai sebuah metodologi yang menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain tindakan-tindakan terpilih dan memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Dari 6,1 miliar penduduk dunia setengahnya adalah perempuan. Dengan jumlah yang banyak ini perempuan mempunyai andil besar dalam setiap bidang kehidupan yang sama besarnya dengan laki-laki khususnya dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan demikian manarik mengkaji partisipasi perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data penelitian yang disebarakan kepada 30 responden perempuan yang aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif di Dayeuh Kolot melalui survey diperoleh hasil yang menggambarkan bahwa bahwa sikap perempuan terhadap pembangunan

* **Rini Rinawati, Dra., M.Si; Dedeh Fardiah, Dra., M.Si; Oji Kurniadi, Drs, M.Si.,** adalah dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba

partisipatif adalah "mendukung", sementara keterlibatan perempuan dalam tahapan proses pembangunan partisipatif memperlihatkan bahwa masih dianggap sedang, hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan sikap yang ditunjukkan oleh mereka tidak menjamin keterlibatan mereka menjadi tinggi atau sejalan dengan sikap mereka.

Kontribusi perempuan dalam proses pembangunan partisipatif berkategori tinggi, dimana kontribusi yang diberikan tidak hanya bersifat non materi dalam arti pikiran tenaga yang sudah dicurahkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, namun juga perempuan memberikan partisipasi dalam wujud materi.

Kendala dalam keikutsertaannya dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif juga cukup dirasakan oleh perempuan seperti dari orang-orang terdekat misalnya suami, anak-anak hal ini terlihat dari data penelitian yang menggambarkan bahwa ketika perempuan dihadapkan pada situasi memilih antara keluarga dan kegiatan lingkungannya, perempuan masih lebih mengutamakan keluarganya, maka keterlibatannya dalam pembangunan partisipatif merupakan pilihan alternatif setelah mengutamakan keluarga.

Kata Kunci : Partisipasi, Wanita, Pembangunan Partisipatif, dan Perencanaan Pembangunan

1 Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan Indonesia mulai bergeser dari pembangunan yang *top down* kepada pembangunan dari bawah (*bottom up*). Pembangunan tidak hanya bersifat linier dan tidak hanya melibatkan aparatur pemerintahan saja. Paradigma pembangunan menjadi "***Pembangunan Partisipatif***". Hal ini dilandasi oleh UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah.

Pada gilirannya peran pemerintah dalam pembangunan yang pada awalnya sebagai "*provider*" atau penyedia/pemberi, pada perkembangan selanjutnya menjadi "*enabler*" yaitu sebagai pendorong atau pemfasilitasi. Selanjutnya pembangunan yang menggunakan pendekatan *top down* dimana pemerintah sebagai *provider* sering disebut sebagai "*orthodox paradigm*", sementara pembangunan dengan pendekatan *bottom up* dimana pemerintah

bertindak sebagai pendorong atau sebagai pemfasilitasi dikenal dengan istilah “*the alternatif paradigm*”.

Dalam pembangunan yang menggunakan pendekatan *bottom up* (partisipatif) tersebut masyarakat menjadi ujung tombak dari sebuah pembangunan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat secara aktif berperan serta dalam menentukan arah pembangunan. Partisipatif dalam pembangunan tidak hanya terbatas dalam pengertian “IKUT SERTA” secara fisik, melainkan keterlibatan yang memungkinkan melaksanakan identifikasi masalah sendiri, mengorganisasikan masalah, mencari akar masalah dan menentukan perencanaan program pembangunan.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang biasa disebut sebagai *participatory planning* menurut pendapat Friedmann merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*):

”Proses politik ini dilakukan secara transparan dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap perkembangannya. Dalam hal ini perencanaan partisipatif lebih sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang diharapkan dapat meminimalkan konflik antar *stakeholder*. Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (*social learning*) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau *stakeholders* tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh *stakeholders* dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas.” (John Friedmann, 1997; 25)

Dari 6,1 miliar penduduk dunia setengahnya adalah perempuan. Dengan jumlah yang banyak ini seharusnya perempuan mempunyai andil besar dalam setiap bidang kehidupan yang sama besarnya dengan laki-laki. Kenyataannya berdasarkan data dari *Human Development Report* (HDR) UNDP 2002 dalam pengambilan keputusan strategis, presentase perempuan Indonesia hanya 8,0% dalam legislatif dan 5,9% dalam eksekutif. Artinya begitu banyak keputusan atau kebijakan itu diambil oleh sebagian besar laki-

laki. Dengan demikian, bisa jadi sebuah pembangunan yang menyentuh perempuan-pun pengambil kebijakannya adalah laki-laki¹.

Oleh karenanya melalui Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diharapkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat optimal. Selain itu di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005 disebutkan bahwa strategi pengarusutamaan gender diterapkan ke dalam proses dan tahapan pembangunan.

Dari kajian permasalahan yang telah diuraikan, maka menarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Bagaimana partisipasi perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap perempuan terhadap perencanaan pembangunan partisipatif?.
2. Pada tahapan apa saja perempuan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif?
3. Bagaimana partisipasi yang ditampilkan perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif?.
4. Kendala apa saja yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif?.

2 Tinjauan Teoritis.

2.1 Tinjauan Komunikasi Pembangunan

Paradigma pembangunan Indonesia pada awalnya memandang pembangunan sebagai suatu perspektif yang tunggal dan evolusioner. Dalam paradigma ini pembangunan diartikan sebagai “...jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik”. (Roger & Shoemaker, dalam Nasutioan, 1996;28)

¹ “*Minimnya Partisipasi Perempuan*” *Artikel*, Pikiran Rakyat, 5 Maret 2006 hal 17

Sebagai upaya yang bersifat evolusioner dan dalam rangka mengejar ketinggalan dari negara maju, maka suka tidak suka, disadari atau tidak disadari paradigma pembangunan identik dengan pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ini banyak mendapat kritikan, karena ternyata pembangunan yang hanya menitikberatkan pada sektor ekonomi telah membawa berbagai akibat yang negatif, seperti; kerusakan alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi. (Tjokrowinoto, 1996:9)

Dalam paradigma pembangunan di atas masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari pembangunan. Masyarakat sebagai objek tidak diikutsertakan dalam pembangunan tersebut. Mereka hanya menikmati hasilnya saja. Celakanya, pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat tersebut seringkali tidak dibutuhkan oleh mereka. Hal ini dikarenakan perencanaan dari pembangunan tersebut bukan merupakan kebutuhan yang lahir dari masyarakat, akan tetapi merupakan kebutuhan segelintir orang dengan berbagai kepentingan. Dengan demikian pembangunan adalah perubahan yang diputuskan dan dilakukan oleh suatu masyarakat untuk kemajuan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan partisipatif alih-alih pembangunan bertumpu pada masyarakat yang disebut sebagai “*the alternative paradigm*”² memiliki prinsip dasar konsep pemberdayaan yang meliputi :

1. *Pembangunan Kota Yang Komprehensif*

Upaya penataan kawasan (masyarakat) harus dipandang sebagai proses pembangunan suatu lingkungan dengan cara sesuai dengan RTRW yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. *Membangun Tanpa Menggusur.*

Proses pembangunan kawasan diharapkan tidak menggusur masyarakat, baik secara langsung (*displacement*) maupun tidak langsung/bertahap (*gentrification process*). Bila penduduk akan digusur, maka harus ada suatu kebijaksanaan yang jelas mengenai bentuk penanganan yang ditentukan berdasarkan aspirasi penduduk.

3. *Memberdayakan masyarakat dan membangun dari dalam*

Pengelolaan sumber daya dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam menggali bakat, potensi, kemampuan, kelebihan yang sudah atau mungkin belum terlihat secara jelas, sehingga akan tercipta partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan tersebut.

² Tri Exnas, *Usulan Teknis, Pendampingan Perumahan Swadaya*, 2005

4. *Berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi.*

Pada akhirnya pembangunan sebagai fenomena sosial menuntut adanya perlakuan dan penanganan yang khusus, terutama mengingat berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Disinilah peran komunikasi pembangunan menjadi instrumen utama. Nasution (1988:62) menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi antar semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan terutama anatar masyarakat dengan pemerintah mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Schramm merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu pembangunan nasional, yaitu:

1. Menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas (*bottom up*)
3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan sejak orang dewasa, hingga anak-anak sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. (Nasution, 1988:55)

2.2 Hakikat Pemberdayaan

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan diantaranya adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat menurut Kartasamita (dalam Hikmat, 2006:1) adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya

sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sementara, Effendy (2000:6) memahami pemberdayaan sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi seluruh anggota masyarakat dan memobilisasikan aspirasi mereka untuk berpartisipasi dengan berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan.

Dengan demikian pemberdayaan dalam wacana pembangunan yang partisipatif akan selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Rappaport (dalam Hikmat, 2006:3) menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan social, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang.

Di sisi lain McArdle (dalam Hikmat, 2006:3) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha-usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Dari berbagai penjelasan mengenai pemberdayaan yang disampaikan oleh para ahli tersebut, maka indicator dari suatu pemberdayaan meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan social politik, dan kompetensi partisipatif (Kieffer, dalam Suharto,2006:63). Parsons memperjelas mengenai indikator dari suatu pemberdayaan yang dilakukan akan merujuk pada tiga dimensi berikut:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dan orang-orang lemah tersebut untuk

memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. (dalam Suharto,2006:63)

Pemberdayaan pada gilirannya menjadi masalah ketika pelaksanaannya secara konseptual bersifat *zero-sum*, maksudnya, proses pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya *power* atau dominasi kelompok terhadap kelompok lainnya. (Craig dan Mayo, 1995). Oleh karena itu pemberdayaan yang dilakukan harus tepat sasaran dan tujuannya. Sumodiningrat menjelaskan bahwa sasaran dan tujuan dari pemberdayaan adalah :

1. Meningkatnya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat dibawah garis kemiskinan,
2. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan social ekonomi produktif masyarakat,
3. Berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparatur maupun warga. (Sumodiningrat, 2000: 109)

Pemberdayaan dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolektif, oleh karena itu memerlukan sebuah strategi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal. Beberapa strategi (*empowerment setting*) yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan menurut Parsons adalah :

1. Aras Mikro, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara individu.
2. Aras Mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok orang yang mana kelompok tersebut digunakan sebagai media intervensi.
3. Aras Makro, yaitu pemberdayaan yang dilakukan dengan Strategi Sistem Besar (Large-System-Strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. (Suharto,2006:66)

Strategi pemberdayaan yang dilakukan tersebut dalam pelaksanaannya ditunjang oleh pendekatan pemberdayaan. Dengan demikian pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan tersebut dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang mengikuti “formula 5P” yaitu:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan dalam hal ini harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak jatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. (Suharto,2006:67)

2.3 Perencanaan Partisipatif

Konsep ini adalah suatu hak masyarakat untuk secara sistematis melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan sampai ke tingkat paling bawah. Secara sitemik artinya warga negara berhak untuk menentukan kebijakan publik (kepentingan umum). Tentunya untuk keputusan-keputusan yang bermakna. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mengurangi ancaman kegagalan-kegagalan terkait dalam semua proses yang berhubungan dengan rancangan, formulasi dan implementasi atau pelaksanaan.

Dengan prinsip *experience based learning process*, fokus dan pendekatan partisipatoris adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk menginisiasi kegiatan dalam pemecahan masalah melalui perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil konsultasi dan pengambilan keputusan diantara mereka sendiri. Fungsi fasilitasi dalam konteks itu tidak hanya bermakna pendampingan bagi proses yang berlangsung dalam masyarakat, tetapi juga bermakna analisis terhadap potensi dan hambatan struktural

Untuk itu pembangunan pemberdayaan perempuan sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua aspek

kehidupan. Model Pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dalam kerangka perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan dan melalui pendekatan “Tridaya” melibatkan berbagai pihak. Pendekatan tridaya yang dimaksud meliputi bidang sosial, ekonomi dan peningkatan sarana dan prasarana.

Hal ini merupakan ciri khas dari model pemberdayaan dalam pembangunan yang bertumpu kepada rakyat (*people centered development*). Keterlibatan banyak pihak dalam konsep pemberdayaan ini, pada akhirnya akan berperan penting dalam keberhasilan program yang dilaksanakan.

Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari penerapan perencanaan pembangunan partisipatif ini adalah sebagai berikut³:

1. Diterapkannya proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif.
2. Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan visi dan misi serta aspirasi kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
3. Rencana tindak (action plan) pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kemampuan keuangan daerah.
4. Rencana tindak pengembangan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan perangkat perundangan yang menunjang proses pembangunan daerah.

Pada sisi lain kebijakan pembangunan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Dasar tahun 1945 dan dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan melalui TAP MPR setiap 5 tahun, dimana arah pembangunan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memberikan penekanan pada visi pembangunan yaitu “mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sebagai langkah untuk mencapai Visi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan menetapkan enam misi yang menjadi dasar pelaksanaan, yaitu⁴:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;

³ Tri Exnas, *Usulan Teknis Pekerjaan Pendampingan Masyarakat Perumahan Swadaya*, Dept. Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, Satuan Kerja Sementara Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jawa Barat, Bandung, 2005

⁴ Download dari www.kalyanamitra.or.id, Maret 2006

2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
5. Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

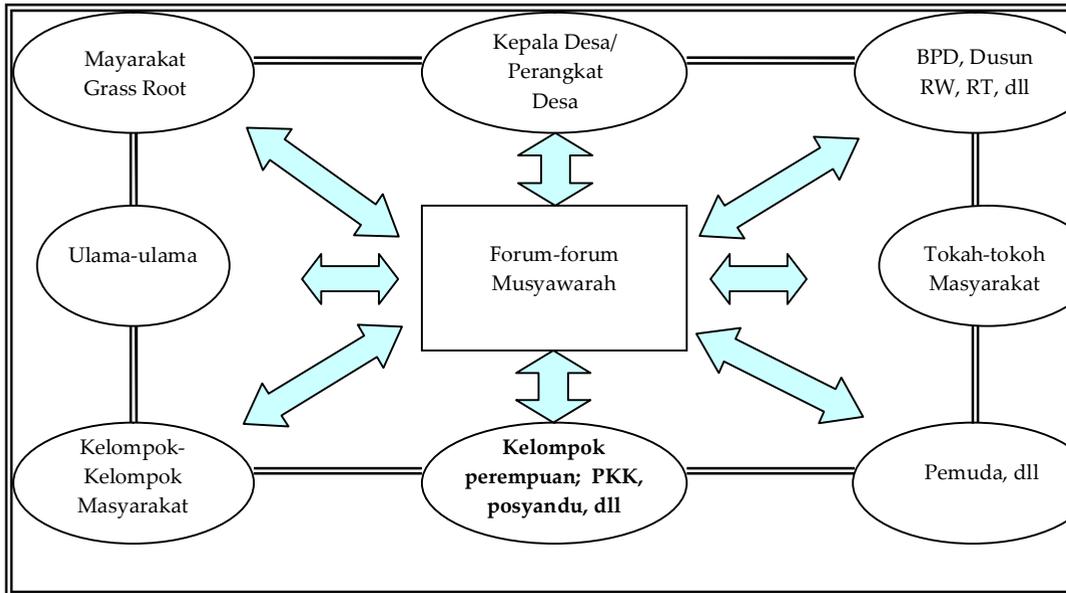
Untuk itu pembangunan pemberdayaan perempuan sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua aspek kehidupan. Model Pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dalam kerangka perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan dan melalui pendekatan “Tridaya” melibatkan berbagai pihak. Pendekatan tridaya yang dimaksud meliputi bidang sosial, ekonomi dan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun model dari pemberdayaan⁵ yang melibatkan berbagai pihak tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: (halaman 157)

Pada model pemberdayaan di atas, maka kita dapat melihat bagaimana kelompok perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat menjadi terlibat dalam proses pembangunan partisipatif. Memang dalam pembangunan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat, maka seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya wanita akan dituntut peran sertanya.

Dengan demikian kelompok perempuan menjadi salah satu dari beberapa kelompok yang turut berperan dalam pembangunan partisipatif. Oleh karena itu pembangunan partisipatif memberikan peluang untuk mengapresiasi berbagai kontribusi perempuan terhadap aspek-aspek pembangunan, antara lain mencakup bidang ekonomi, social, budaya, dan pemberian prioritas kepada perempuan untuk memperoleh akses dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan tersebut.

⁵ Tri Exnas, *Usulan Teknis Pekerjaan Pendampingan Masyarakat Perumahan Swadaya*, Dept. Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, Satuan Kerja Sementara Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jawa Barat, Bandung, 2005

Gambar 1. Model Pemberdayaan Masyarakat



3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif”, yaitu suatu metode yang bertujuan tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan mengukur dengan cara menghimpun data dan fakta. (Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja RosdaKarya. Bandung. 2001 : 24).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Kecamatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Dayeuh Kolot merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung sebagai penerima berbagai program pembangunan partisipatif, diantaranya “Program Fasilitasi Perencanaan Prasarana Lingkungan Perumahan/Permukiman Partisipatif” dari Dinas Kimtawil (Permukiman dan Tata Wilayah) Kabupaten Bandung pada tahun 2004 dan program “Pekerjaan Pendampingan Masyarakat dalam

Rangka Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh” dari Dinas Perumahan dan Permukiman (TARKIM) Propinsi Jawa Barat pada tahun 2006.

Dengan adanya kedua program pembangunan dari pemerintah yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat kita dapat melihat bagaimana keterlibatan perempuan yang ada di kecamatan Dayeuh Kolot pada program pembangunan tersebut.

Responden dari penelitian ini adalah para perempuan yang ada dalam organisasi yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Organisasi yang dimaksud adalah Kecamatan, BPD, PKK, LPM yang ada ditingkat kecamatan maupun desa. Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Dayeuh Kolot, maka jumlah perempuan yang aktif dalam organisasi yang ada berjumlah 100 orang. Selanjutnya dari jumlah tersebut dipilih secara random acak sederhana sebesar 30 orang dari perempuan yang aktif di organisasi tersebut melalui pengundian untuk dijadikan responden yang diberi angket.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- 1 Angket. Teknik ini menjadi teknik pengumpulan data yang utama kepada responden penelitian.
- 2 Wawancara. Teknik wawancara dilakukan pula bila responen tidak memahami dari pertanyaan yang diajukan. Teknik ini juga dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan partisipasi perempuan dalam pembangunan partisipatif.
- 3 Kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan pembangunan partisipatif yang dikaji dalam penelitian ini.

4 Hasil Penelitian

Usia responden, memperlihatkan hasil bahwa mayoritas perempuan yang aktif dalam pembangunan partisipatif berusia sekitar 30-49 tahun. Dari rata-rata usia perempuan yang aktif dalam partisipasi pembangunan di wilayah Dayeuh Kolot ternyata didominasi oleh perempuan dewasa dan sudah relatif matang pemikirannya. Berdasarkan usia ini tergambar bahwa antara usia 30-49 ini memang masa dimana perempuan sudah mulai memikirkan kontribusi dirinya buat lingkungan sehingga kebutuhan aktualisasi diri dalam masa-masa ini sedang terjadi dalam diri perempuan

tersebut, maka wajarlah jika pada rata-rata usia di atas inilah mereka aktif melibatkan diri dalam pembangunan masyarakat di wilayahnya.

Seluruh responden yang dimintai kesediaannya untuk mengisi angket semuanya menyatakan sudah menikah walaupun ada sejumlah 7 % sudah menjadi janda, sehingga kalau kita kaitkan dengan usia responden logikanya wajar saja karena usia antara 30 – 50 kemungkinan besar sudah menikah. Hal ini tidak terlepas dari konsep budaya orang timur yang memiliki mitos bahwa perempuan di atas 25 tahun sudah harus menikah. Selain status marital, hal yang tak kalah pentingnya dalam mengetahui identitas responden adalah masalah pekerjaan, hal ini akan menarik dibahas karena kita menjadi tahu sejauhmana status pekerjaan ini menentukan sejauhmana keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayahnya

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sejumlah 86,6 % perempuan tidak bekerja secara formal namun menjadi ibu rumah tangga, 10 % dari para perempuan responden penelitian ini sebagai pedagang dan hanya 3,4 % sebagai pegawai negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah diduga sebelumnya bahwa kemungkinan besar mereka yang aktif di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan rata-rata mereka yang menjadi ibu rumah tangga. Beberapa kemungkinan alasan mengapa ibu rumah tangga lebih aktif di wilayahnya termasuk pada masalah pembangunan diantaranya karena ibu rumah tangga punya banyak waktu untuk aktif di wilayahnya sehingga mencari aktifitas di luar dengan terlibat langsung dalam kegiatan di lingkungannya. Sedangkan mereka yang bekerja, jangankan punya waktu untuk aktif dilingkungannya waktunya sudah tersita habis oleh pekerjaan formalnya.

Di samping alasan banyak waktu yang dipunyai oleh para ibu rumah tangga untuk aktif di lingkungannya, merekapun berkeinginan untuk mengaktualisasikan diri dengan cara eksistensi pada lingkungan sekitarnya. Jadilah para perempuan sebagai ibu rumah tangga tersebut aktif dalam berbagai organisasi yang ada di lingkungannya.

Aktifitas para perempuan di lembaga-lembaga yang ada di wilayahnya ternyata rata-rata mereka aktif di PKK, dengan angka rata-rata 36,6 % belum lagi disamping di PKK mereka juga aktif di dua tempat seperti LKMD, MUI dll, dengan rata-rata angka 3,4 %, 13,4 %, 26,6 %, 6,6 %, 3,4 % Sehingga kita dapat berasumsi bahwa selama ini memang hanya PKK lah yang banyak menonjolkan peran perempuan didalamnya, karena aktifitasnya

identik dengan urusan perempuan, seperti posyandu dalam melayani anak-anak balita, arisan, lansia, pengajian ibu-ibu dan kegiatan-kegiatan yang selama ini biasanya dilakukan oleh perempuan, kita jarang mendapati pengurus PKK adalah pria.

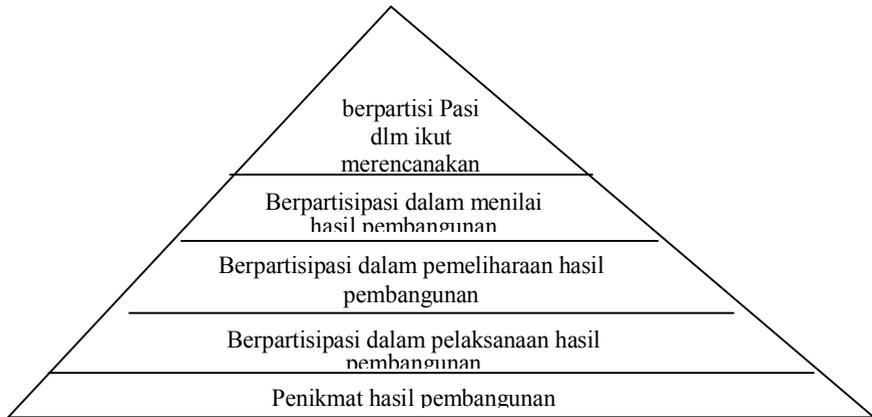
Sebaliknya aktifitas perempuan di lembaga semacam LKMD misalnya jarang kita melihatnya, hal ini tercermin pula hasil penelitian yang memperlihatkan dari responden penelitian hanya 10 % saja perempuan yang aktif dalam lembaga LKMD. Begitu pula di lembaga MUI hanya 3.4 % perempuan yang menjadi responden aktif sebagai anggotanya, bahkan di BPD hanya 6,6% dari perempuan yang aktif menjadi anggotanya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perempuan di Dayeuh Kolot mempunyai sikap positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan nuansa pemberdayaan masyarakat atau dengan kata lain paradigma pembangunan partisipatif. Dari sikap positif yang dipunyai oleh para perempuan yang ada di Dayeuh Kolot terhadap perencanaan pembangunan pada gilirannya memberikan kontribusi pada keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam program perencanaan pembangunan partisipatif.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif khususnya pada perencanaan pembangunan partisipatif ini tentunya bila melihat pada tahapan partisipasi, maka kesemua tahapan itu sudah dikerjakan oleh para perempuan yang ada di Dayeuh Kolot. Adapun tahapan dari tingkatan partisipasi yang dilalui oleh responden tersebut sebagai berikut: sosialisasi, Focus Group Discossion (FGD), pembentukan Tim SKS (Survey Kampung Sendiri), pelaksanaan SKS (Survey Kampung Sendiri), dan lokakarya. Sementara itu dari sisi tingkatan partisipasi yang ditunjukkan oleh para perempuan yang ada di Dayeuhkolot sudah ada pada tahapan keikutsertaan pada perencanaan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan menjadi tingkatan tertinggi dari tahapan partisipasi yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam proses pembangunan, hal ini sesuai dengan gambar berikut : (halaman 172).

Hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa perempuan di Dayeuh Kolot menjadi bagian dalam proses pembangunan yang partisipatif, memberikan gambaran bahwa model Pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dalam kerangka perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan dan melalui pendekatan “Tridaya” telah dilaksanakan di Dayeuh Kolot.

Gambar 2 Tingkatan Partisipasi Perempuan



Perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di Dayeuh Kolot telah melibatkan berbagai pihak. Hal ini merupakan ciri khas dari model pemberdayaan dalam pembangunan yang bertumpu kepada rakyat (*people centered development*). Keterlibatan banyak pihak dalam konsep pemberdayaan ini, pada akhirnya akan berperan penting dalam keberhasilan program yang dilaksanakan.

Dari sisi kerangka misi otonomi daerah pembangunan partisipatif yang sudah dilaksanakan di Dayeuh Kolot dapat menjadi satu arena interaksi berbagai pihak yang sudah barang tentu sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, tentang memberikan peluang bagi setiap pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, berdasarkan potensi dan masalah yang ada di daerahnya.

Selanjutnya kontribusi perempuan secara materi terhadap pembangunan yang dilaksanakan di lingkungannya dalam proses pembangunan partisipatif masih cukup rendah. Hal ini menandakan bahwa perempuan walaupun secara sikap, maupun keterlibatannya didalam proses pembangunan partisipatif ikut aktif, tetap saja nilai kontribusinya masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya misalnya kesempatan untuk memberikan kontribusi tetap masih didominasi oleh kaum

pria, selain itu dari sisi perempuan itu sendiri mereka belum siap memberikan kontribusinya kepada proses pembangunan partisipatif, sehingga mereka hanya ikut terlibat secara pasif saja.

Hal ini karena pada kenyataannya peranan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam pengambilan keputusan masih terjadi ketimpangan dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak heran kalau beberapa kendala dijumpai perempuan pada keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif. Kendala yang sering dihadapi oleh perempuan pada keterlibatannya atau partisipasinya para program pembangunan seperti dari keluarga sendiri yaitu suami dan serta, lingkungan, serta rekan sekerja dalam organisasi yang dimasukinya. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika perempuan terlibat dalam pembangunan dimana dihadapkan pada situasi harus memilih antara keluarga dan kegiatan lingkungannya, perempuan masih lebih mengutamakan keluarganya, maka keterlibatannya dalam pembangunan partisipatif merupakan pilihan alternatif setelah mengutamakan keluarga.

Ada beberapa penyebab yang membuat perempuan seringkali lebih memilih keluarga ketimbang urusan masyarakat yaitu : pengaruh tata nilai, adat istiadat, dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang secara realita dan berlangsung berabad-abad memberikan peluang lebih besar bagi laki-laki dibanding perempuan. Secara antropologis dikenal ada sistem matriarchat (garis ibu) dan ada sistem patriarchat (garis ayah), namun prioritas untuk lebih maju tetap diberikan pada laki-laki, yang dikenal dengan ideologi patriarkhi.

Dengan adanya budaya seperti itu seringkali pekerjaan domestik (urusan keluarga, seperti anak, dapur dsb) tetap menjadi tanggung jawab perempuan atau seorang ibu. Disamping itu perempuan (seorang ibu) dengan naluri keibuannya yang punya kedekatan dengan anak-anak, maka seringkali tepat lebih memilih urusan keluarga (anak-anak) dibanding dengan urusan kemasyarakatan. Hal ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh kesediaan dan kemauan perempuan sendiri untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tugas-kewajiban domestik dan publik secara selaras, serasi dan seimbang.

5 Kesimpulan

Dari hasil analisis pada pembahasan dilandasi teori-teori yang di gunakan dalam kajian pustaka serta berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sikap perempuan terhadap pembangunan partisipatif sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini yang ditunjukkan dengan aspek kognitif dan afeksi yang memadai dari perempuan ini yang merepresentasikan sikap positif yang diberikannya.
- b. Keterlibatan perempuan dalam tahapan proses pembangunan partisipatif cukup memadai, artinya perempuan telah ikut berpartisipasi dalam proses tersebut
- c. Kontribusi perempuan dalam tahapan proses pembangunan partisipatif belum memberikan kontribusi optimal, mereka hanya terlibat secara pasif, sehingga kontribusinya belum memadai.
- d. Kendala yang dihadapi perempuan ketika berpartisipasi dalam pembangunan partisipatif masih relatif rendah namun tetap ketika perempuan dihadapkan pada situasi memilih antara keluarga dan kegiatan lingkungannya, perempuan masih lebih mengutamakan keluarganya.

6 Rekomendasi

Menurut penjabaran fenomena tentang peran perempuan dalam paradigma pembangunan partisipatif maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan diantaranya :

- a. Perlu adanya stimulant berupa pendampingan atau kegiatan fasilitasi bagi para perempuan baik dari pihak pemerintah maupun elemen-elemen lain agar keterlibatan perempuan dalam pembangunan partisipatif berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Adanya sosialisasi rencana pembangunan secara komprehensif sehingga perempuan paham akan peran dan fungsinya dalam konteks pembangunan partisipatif termasuk keterlibatannya dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat. 2003. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Alvin Y.SO dan Sumarsono. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung : Alfabeta.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Effendi, Tadjudin Noer. 2000. *Pembangunan, Krisis, dan Arah Reformasi*. Muhammadiyah University Press.
- Halim, Rr Suhartini A dan Imam Khambali Abd. Basyid. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Hamijoyo, Santoso S. 2005. *Komunikasi Partisipatoris; Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknis Penelitian Gender*. Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Haryono, Dedi. 2003. "Perencanaan Bersama Masyarakat". *Makalah dalam rangka Sosialisasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif, DPP INKINDO Prop. Jawa Barat, Bandung*.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategy Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- John Friedmann. 1987. *Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action*. New Jersey : Princeton University Press.
- Mahfud MD, Moh. 1997. *Tantangan Pembangunan di Indonesia; Beberapa Pandangan Kontemporer dari Dunia Kampus*. Yogyakarta : UII Press.
- Mubyarto. 1998. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Aditya Media.

- Nasution, Zulkarimein. 1988. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Priyono, Onny S dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Rogers, Everett.M. 1984. *Komunikasi dan Pembangunan; Perspektif Kritis*, Jakarta : LP3ES.
- Sajogyo, Pudjiwati dan Sajogyo. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Suprpto, Riga Adiwoso. 1993. “Kerangka Pembangunan Wanita: Feminisme Dalam Perspektif Historis”. *Makalah* dalam “Palatihan bagi Pelatih Inti Mengenai Gender dan Pembangunan, Kantor Meneg UPW. Cisarua
- Susanto, Phil Astrid. 1995. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta : Binacipta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan; Dilema dan Tangtangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tri Exnas. 2005. *Usulan Teknis Pekerjaan Pendampingan Masyarakat Perumahan Swadaya*, Dept. Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, Satuan Kerja Sementara Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jawa Barat, Bandung.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT, Elex Media Komputindo.
- Zubaedi. 2007. *Perberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumber Lain :

www.kalyanamitra.or.id , Maret 2006

Kerangka Acuan Kerja. 2004. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Prasarana Lingkungan Perumahan/Pemukinan Partisipatif di Kabupaten Bandung, 2004

Konsep P2KP” download dari : <http://www.p2kp.org>

Laporan Akhir, *Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung, 2004

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung, No 40 tentang: *Peraturan Daerah dan Pola dasar Pembangunan Daerah tahun 2001 – 2005*, Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bandung, 2001

Makalah dalam Pelatihan bagi Pelatih Inti Mengenai Gender dan Pembangunan, 1993, *Kerangka Pembangunan Wanita: Feminisme Dalam Perspektif Historis*, Cisarua, Kantor Menneq UPW.

Modul Pelatihan Tim Survey Kampung Sendiri, *Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Menengah*, Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung, 2004

Modul *Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan RP4D*, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Ditjen Perkim, Jakarta, 2001

Panduan untuk Fasilitator Infomobilisasi, 2007, *Memberdayakan Masyarakat dengan Mendayagunakan Telecenter*, Jakarta, Bappenas-UNDP

Petunjuk *Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Perkotaan dan Pedesaan (dengan konsep Tridaya)*, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah- Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, 2001

PNPM Download dari : <http://www.kdp.or.id>